

**HUBUNGAN AGAMA DAN NEGARA
(STUDI ATAS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Ushuludin, Studi Agama dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memproleh Gelar
Sarjana Filsafat Islam (S.Fil.I)**

OLEH:

AKHMAD KUSAIRI

NIM. 06510026

**JURUSAN AQIDAH DAN FILSAFAT
FAKULTAS USHULUDIN, STUDI AGAMA DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2010

NOTA DINAS PEMBIMBING

Yogyakarta, 5 Juli 2010

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ushuluddin, Studi Agama
dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga
di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Sesudah melakukan beberapa kali bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Akhmad Kusairi
Nim : 06510026
Jurusan : Aqidah dan Filsafat
Judul Skripsi : *Hubungan Agama dan Negara: Studi atas Partai Keadilan Sejahtera*

Maka selaku pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak diajukan untuk dimunaqasahkan.

Demikian, mohon dimaklumi adanya.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Mutiullah, S.Fil.I/ M.Hum
NIP.19791213 200604 1005



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor: UIN.02/DU/PP.00.9/0853/2010

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : *Hubungan Agama dan Negara:
Studi atas Partai Keadilan Sejahtera*

Diajukan Oleh :

Nama : Akhmad Kusairi
NIM : 06510026
Jurusan : Aqidah dan Filsafat

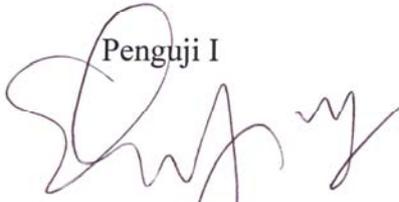
Telah dimunaqosyahkan pada hari : Jum'at, tanggal 9 Juli 2010
dengan nilai : 90 / A- dan telah dinyatakan telah diterima
oleh Fakultas Ushuluddin, Studi Agama dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga

PANITIA UJIAN MUNAQOSYAH :

Ketua Sidang


Mutiullah, S.Fil.I. M.Hum
NIP.19791213 200604 1005

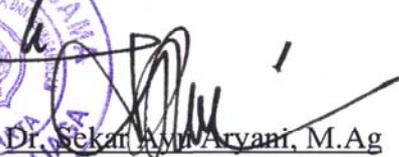
Penguji I


Dr. H. Shofiyullah, Mz, M.Ag
NIP.19710528 200003 1 001

Penguji II


Dr. H. Zuhri, M.Ag
NIP.19700711200 1121001

Yogyakarta, 9 Juli 2010
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Ushuluddin, Studi Agama
dan Pemikiran Islam
D E K A N



Dr. Sekar Ayu Aryani, M.Ag
NIP.19591218 198703 2 001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

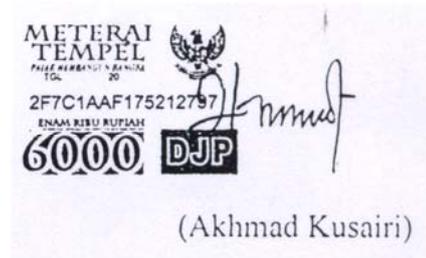
Nama : Akhmad Kusairi
Nim : 06510026
Fakultas : Ushuluddin
Jurusan Prodi : Aqidah dan Filsafat
Alamat Rumah : Desa Pancawarna kec. Pedamaran Timur, kabupaten Ogan
Komerling Ilir, Sumatra Selatan
Alamat di Yogyakarta: Jl. Timoho no 64 C Ngentak Sapen Yogyakarta
Telp. /Hp. : 081904017245
Judul Skripsi : *Hubungan Agama daan Negara: Studi Atas Partai
Keadilan Sejahtera*

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqosyahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merevisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqosyah, jika lebih dari 2 (dua) bulan maka saya bersedia dinyatakan gugur dan bersedia munaqosyah kembali.
3. Apabila di kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya, maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar kesarjanaannya saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 Juni 2010
Saya yang menyatakan



MOTTO

"manusia tidak dikatakan manusia jika
belum bermanfaat bagi orang lain"

"Segala kebaikan manusia dilihat dari
sejauh mana ia
berguna bagi yang lain"

PERSEMBAHAN

Dengan segenap hati,
kupersembahkan karya
tulisan sederhana ini
untuk: Abah dan Emak,
beserta Ayuk dan
Kakakku tercinta, yang
dengan tulus selalu
memberikan doa restu
serta segala bantuannya
demi mewujudkan Impian-
impianku. Semoga Allah
SWT selalu memberkahi
dan melindungimu. Amin

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT. karena hanya dengan hidayah inayah serta rahman dan rahim-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul "*Hubungan Agama dan Negara: Studi Atas Partai Keadilan Sejahtera*" ini. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada nabi dan rasul terakhir, muhammad SAW. yang pada diri beliau terdapat banyak teladan bagi umatnya.

Penulis yakin bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa rahmat Allah dan bantuan, bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung dan materil maupun spiritual. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Amin Abdullah selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Ibu Dr. Sekar Ayu Aryani, MA. selaku Dekan beserta para Pembantu Dekan Fakultas Ushuludin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang secara prosedural telah mengijinkan penulisan skripsi ini.
3. Bapak Fakhrudin Faiz selaku Ketua Jurusan Aqidah dan Filsafat, dan Bapak Zuhri, S.Ag, M.Ag. Selaku Seketaris Jurusan Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Mutiullah yang sudah berkenan membimbing penulis dalam menulis skripsi ini.
5. Segenap dosen di Jurusan Aqidah dan Filsafat UIN Sunan Kalijaga.

6. Segenap karyawan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, terutama Ibu TU Jurusan Aqidah dan Filsafat, terimakasih atas pelayanan dengan senyum selama ini.
7. Aba Taukhid (almarhum) dan Emak Robiah tercinta, hanya ribuan maaf yang dapat ananda ucapkan, karena ananda sadar, ananda bisa membalas semua budi dan kasih sayang bapak dan ibunda tercinta. Semoga Allah SWT berkenan memberikan yang terbaik buat kita semua. Amin.
8. Saudara-saudaraku tercinta, ada Ayuk Asia, Ayuk Jamilah, Ayuk Jumiati, Kakak Burhan, Ayuk Rusdianti, Ayuk Misnawati, semoga perjuangan kalian membuahkan hasilnya. Amin
9. Keponakan-keponakanku yang lucu, dan bandel-bandel, Sekolah dan belajarlah selalu, kejar cita-citamu, supaya nanti kalian bisa mengabdikan kepada bangsa dan negerimu.
10. Sahabatku-sahabatku di The Al-Falah Institut (Alfin's) ada Ipung, Maya (Basir), Syauqi, Ari, Arif, Sodik, Feri (Konang), Muzammil, dan lain-lain. Semoga perjuangan sahabat-sahabat selama ini barokah dikemudian hari.
11. Semua temen-temenku di Jurusan Akidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Angkatan 2006, khususnya, Umi, Rifan, Misbah, Muhibudin, Maskur, Matroni, Via, Ludiya, Evia, Dewi.
12. Buat teman-teman di rental Emwe dan foto copy, mbak Ninuk, mbak Imoet, mbak Badriah, Hisyam, Mas Puji, dan mas Ari.
13. Tak lupa pula buat Ade, yang selama ini sudah 'menemani' penulis dalam menulis skripsi ini.

14. Buat sang *proofreader*, Mas Ayiko gak mirip Musashi. Terima kasih buat coret-coretnya yang sangat membantu. Dan terakhir buat adik Loni, dan Mbak Ari yang sudah menjadi teman selama ini.

Saya sadar skripsi yang tidak terlalu tebal ini, masih bergelimang luput dan kekurangan serta kelemahan walaupun telah berusaha menulis sesempurna mungkin. Namun demikian, saya sangat menyadari bahwasannya. Semua kekurangan dan kelemahan skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya. Oleh karena itu, kritik konstruktif dari semua pihak sangat saya harapkan demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirul kalam, semoga karya sederhana ini bermanfaat bagi siapapun yang membacanya, terutama bagi mereka yang meminati kajian Islam politik.

ABSTRAK

Gerakan besar mahasiswa yang kemudian menyebabkan terjadinya reformasi merupakan momentum tepat untuk membangun negeri yang besar dengan cara pandang yang besar pula. Selain itu, reformasi juga membawa iklim baru bagi kehidupan masyarakat Indonesia dari kungkungan politik yang selama ini membelenggu. Akibat dari situasi ini banyak bermunculan banyak partai politik baru. Salah satu partai politik yang muncul tersebut adalah Partai Keadilan (PK) yang dalam perjalanannya nanti berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS). PKS adalah partai politik yang mempunyai asas Islam yang ikut menyumbangkan tren positif bagi perkembangan perpolitikan di Indonesia. Aksi-aksi partai ini tak bisa dipungkiri memberikan kontribusi positif bagi demokratisasi di Indonesia. Kehadiran para politisi Islam ini secara tidak langsung ikut memberikan perubahan di dalam sistem kepartaian maupun parlemen di Indonesia.

Persoalan yang sering menjadi sorotan dalam diri PKS adalah menyangkut bagaimana partai yang berideologi Islam ini menempatkan diri di Indonesia yang menganut prinsip negara bangsa. Semangat PKS dalam memperjuangkan agenda formalisasi syari'at Islam dalam wilayah negara, melahirkan polemik yang hangat. Karena bagaimanapun sebagai partai Islam tanpa cita-cita ini akan kehilangan esensinya. Mengingat cita-cita pendirian negara Islam telah pudar di Indonesia maka perjuangan yang mengarah pada penerapan syari'at Islam menjadi pilihan terakhir. Di sinilah letak pentingnya penelitian terhadap PKS ini. Dalam penelitian ini Penulis berusaha mencari posisi PKS dalam hubungan agama dan negara, benarkah apa yang diwacanakan selama ini bahwa PKS ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam?

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka library (*library research*) yang bersifat kualitatif dengan menggunakan metode pustaka dan dokumentasi. Penelitian ini memfokuskan kepada aspek pemikiran, sejarah pendirian Partai Keadilan Sejahtera serta visi-misi yang diusungnya, terutama yang berkaitan dengan persoalan hubungan agama dan negara.

Untuk membaca posisi PKS mengenai hubungan agama dan Negara penulis menggunakan tiga teori.. *Pertama* Integralisme adalah teori yang berpandangan konsep bersatunya agama dan negara. Dengan kata lain Agama dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*). *Kedua*, sekularisme merupakan antitesis dari teori kelompok pertama, yaitu, bersifat sekularistik. *Ketiga*, simbiosis mutualisme, teori ini memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik yaitu hubungan timbal-balik dan saling memerlukan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Partai Keadilan Sejahtera walaupun secara tampilan politik dikesankan sebagai partai terbuka, tapi dalam ruang yang tertutup partai ini menyimpan beberapa agenda islamis. Ada formalisasi syariat Islam, *khilafah Islamiyah*, memperjuangkan minoritas muslim di belahan dunia serta ingin menerapkan pemerintahan yang islami. Dari beberapa agenda itu, di sini menemukan bahwa PKS jika dibaca melalui teori hubungan agama dan negara, masuk kepada teori kelompok pertama, yaitu integralisme, teori yang berpandangan bahwa anatara agama dan negara merupakan sesuatu yang integral, artinya terjadi penyatuan antara keduanya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI	xi
PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	9
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	20
G. Sistematika Pembahasan	21

BAB II	PKS; SEJARAH, STRUKTUR DAN PEMIKIRAN	21
	A. Sejarah Berdirinya Partai Keadilan Sejahtera	21
	B. Visi dan Misi Partai Keadilan Sejahtera	38
	C. Prinsip Dasar Kebijakan PKS	39
	D. Struktur Organisasi Partai Keadilan Sejahtera	46
	E. Nama dan Lambang Partai Keadilan Sejahtera	55
BAB III	STUDI AGAMA DAN NEGARA	58
	A. Studi Agama dan Negara; Kasus Luar Negeri	58
	B. Wacana Hubungan Agama dan Negara; Kasus Indonesia	73
BAB IV	PKS: ANTARA AGAMA DAN NEGARA	102
	A. Pembacaan PKS terhadap Hubungan Agama Negara	102
	B. Posisi PKS dalam Hubungan Agama Negara	119
	C. Catatan Penulis terhadap Konsep Hubungan Agama-Negara PKS	124
BAB IV	PENUTUP	127
	A. Kesimpulan	127
	B. Saran	133
DAFTAR PUSTAKA		134
CURRICULUM VITAE		140

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama **Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI no. 158 tahun 1987 dan no. 0543 b/U/1987**. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	-	-
ب	ba	b	Be
ت	ta	t	Te
ث	sa	ṣ	es dengan titik di atas
ج	jim	j	Je
ح	ha	ḥ	ha dengan titik di bawah
خ	kha	kh	ka-ha
د	dal	d	De
ذ	za	ẓ	z dengan titik di atas
ر	ra	r	Er
ز	zai	z	Zet
س	sin	s	Es
ش	syin	sy	es-ye
ص	sad	ṣ	es dengan titik di bawah
ض	dad	ḍ	de dengan titik di bawah
ط	ta	ṭ	te dengan titik di bawah
ظ	za	ẓ	zet dengan titik di bawah
ع	‘ain	‘	koma terbalik di atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	f	Ef
ق	qaf	q	Ki
ك	kaf	k	Ka
ل	lam	l	El
م	mim	m	Em
ن	nun	n	En
و	wau	w	We

هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila ter-letak di awal kata)
ي	ya	y	ya

2. Vokal

a. Vokal Tunggal

Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fatḥah	a	A
—	Kasroh	i	I
—	Ḍammah	u	U

b. Vokal Rangkap

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	Fatḥah dan alif	Ai	a-i
و	Fatḥah dan wau	Au	a-u

Contoh:

→ *kaifa*

→ *haua*

c. Vokal Panjang (*maddah*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Fatḥah dan alif	-	a dengan garis di atas
ي	Fatḥah dan ya	-	a dengan garis di atas
ي	Karah dan ya	-	i dengan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	-	u dengan garis di atas

Contoh:

- *qāla*

- *qīla*

- *sa'ā*

- *yaqūlu*

3. *Ta' Marbūṭah*

a. *Ta Marbūṭah* hidup

Ta' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harkat fathah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah “ t ”.

b. *Ta' Marbūṭah* mati

Ta' marbūṭah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah “ h ”.

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang “al” serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan “ t “ atau “ h “.

Contoh:

————→ *Ṭalḥah* atau *Ṭalḥatu*

————→ *Rauḍah al-Jannah* atau *Raudatul Jannah*

4. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: - *rabbānā*

5. Kata Sandang

Kata sandang “ال” ditransliterasikan dengan “al” diikuti dengan tanda penghubung strip (-), baik ketika bertemu dengan huruf *qamariyyah* maupun huruf *syamsiyyah*. Contoh:

Cotoh :

القسم ---- *al-qasamu*

الرجل ---- *al-rajulu*

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga unuk awal kalimat, nama diri, dan sebagainya seperti ketentuan yang berlaku dalam EYD. Awal kata sandang pada nama diri tidak ditulis dengan huruf capital, kecuali jika terletak pada awal kalimat.

Contoh :

—————→ *wa mā Muḥammadun illā rasūl*

Penggunaan huruf kapital untuk Allāh hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh :

—————→ *naṣrun minallāhi wa fathun qarīb*

7. Pengecualian

System transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negeri yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wacana hubungan antara agama dan negara, khususnya Islam bukanlah wacana yang baru. Wacana ini sudah ada paling tidak sejak jaman Nabi Muhammad SAW. Ketika itu Nabi dengan kepiawaiannya sebagai pemimpin yang dibantu dengan pengalaman kenabian membuat terobosan yang bisa diterima oleh semua pihak di kalangan suku-suku di Yastrib. Terobosan Nabi itu adalah berupa piagam Madinah yang mengikat semua suku yang ada di Madinah dalam satu deklarasi bersama.

Hubungan antara agama (*ad-dīn*) dan negara (*daulah*) dalam Islam, bagi kaum formalis telah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. sendiri setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Dari nama yang dipilih oleh Nabi (Madinah) bagi kota hijrahnya itu menunjukkan rencananya dalam mengemban misi suci dari Tuhan, yaitu menciptakan dan mewujudkan masyarakat berbudaya tinggi yang menghasilkan suatu entitas sosial-politik berbentuk sebuah negara bernama Madinah.

Negara Madinah yang dipimpin Rasulullah SAW, seperti ditulis oleh Robert N. Bellah, adalah model bagi hubungan antara agama dan negara dalam Islam. Bellah berpendapat bahwa sistem yang dibangun Nabi itu adalah “*a better model for modern national community building than might be imagined*” (suatu contoh bangunan komunitas nasional modern yang lebih

baik dari yang dapat dibayangkan). Komunitas itu disebut “modern” karena adanya keterbukaan bagi partisipasi seluruh anggota masyarakat dan karena adanya kesediaan para pemimpin untuk menerima penilaian berdasarkan kemampuan.¹

Eksperimen Madinah itu merupakan pilihan Nabi sebagai pondasi hidup bernegara. Fakta sejarah terpenting dari sistem sosial-politik itu adalah dokumen termasyhur yang pernah ada, yaitu Piagam Madinah, yang di kalangan para sarjana modern menjadi amat terkenal disebut sebagai “Konstitusi Madinah.”. Piagam Madinah tersebut merupakan manifesto politik pertama dalam sejarah Islam yang bertujuan membentuk masyarakat yang harmonis, sejahtera, dan berkeadilan yang terdiri atas banyak suku dan agama. Dengan Piagam itu, Nabi Muhammad ingin memproklamkan bahwa semua warga negara, baik Muslim maupun non-Muslim adalah satu bangsa yang memiliki hak dan kewajiban yang sama.

Dalam waktu singkat, Rasulullah SAW berhasil membuat perubahan di mana budaya, pemikiran dan sosio-politik bangsa Arab menjadi gemilang. Semua perubahan ini tentu saja karena perencanaan dan program yang jitu dan bijaksana. Ini dapat dilihat bagaimana Rasulullah SAW melakukan hijrah, membina persaudaraan, membentuk tatanan sosial dan membangun ekonomi, politik, sosial umat Islam di Madinah.

¹ *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemoderenan*, (Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina, 2000), hlm. 559.

Manifesto politik pertama yang diperkenalkan oleh Nabi Muhammad SAW tersebut merupakan pijakan awal yang melahirkan interpretasi yang beragam. Sejarah mencatat bahwa di ranah diskursus mengenai hubungan agama dan negara, telah memunculkan sekian banyak pemikiran politik yang kemudian disebut dengan teori politik Islam. Di antaranya adalah Ibn Arabi, hidup pada abad ke-9 dengan *Sulūk al-Mālik fī Tadbīr al-Mamālik*-nya, yang menekankan pada Ketuhanan dan memadukannya dengan teori usul Negara; al-Farabi (870-950 M), dengan karyanya *Ara-Ahl al-Madīnah al-Faḍīlah* dan *al-Siyāsah; al-Madāniyah* menyatakan bahwa yang dapat dan boleh menjadi kepala negara adalah anggota masyarakat atau manusia paling sempurna al-Mawardi (975-1059 M), yang menekankan hubungan yang demikian erat antara *Syarī'ah* dan *Imāmah*; al-Ghazali (1058-1111 M), yang melihat agama sebagai orde sosio-politik dan penguasa sebagai pemeliharanya; Ibn Taimiyah (1263-1329 M), yang berpikiran bahwa politik didasarkan atas syariat; Ibn Khaldun (732-784 H / 1332-1382 M) yang menyatakan secara tegas bahwa Politik berdasarkan agama adalah berguna untuk dunia dan akhirat.²

Tokoh-tokoh tersebut mengajukan berbagai teori tentang Islam dan negara. Teori yang ditawarkan tentu saja didasarkan pada *naṣ-naṣ*, seperti prinsip musyawarah atau konsultasi, ketaatan kepada pemimpin, keadilan, persamaan, dan kebebasan beragama.³

² Ahmad Syafi'i Maarif dalam M Rusli Karim, *Negara dan peminggiran Islam Politik: Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Islam Orde Baru di Indonesia era 1970-1980-an*. (Yogyakarta: Tiara Wacana, 199) hlm ix-x.

³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: UI-Press, 1993), hlm. 4.

Perdebatan seputar hubungan agama dan negara juga terjadi di Indonesia. Dari segi formulasi, hubungan antara agama dan negara di Indonesia sangat unik. Hal ini dikarenakan Indonesia bukan negara sekuler atau negara agama, tetapi Indonesia memilih berkompromi dengan ideologi Pancasila, yang didalamnya meminjam istilahnya Gus Dur, merupakan sintesis antara agama dan negara. Artinya, Indonesia, walaupun mayoritas penduduknya muslim, bukanlah negara yang menganut prinsip negara Islam.

Indonesia juga bukan negara yang ditata secara sekuler yang tidak memperhatikan kepentingan keagamaan warganya. Sebagai negara yang tidak sekuler, Indonesia memberi kesempatan dan bahkan membantu warganya dalam menjalankan ajaran agamanya. Karena itu secara formal-konstitusional, Indonesia telah berusaha untuk menyelesaikan masalah tersebut sejak tahun 1940-an. Hasil sidang BPUPKI, piagam Jakarta, dan sidang konstituante merupakan sekelumit peristiwa untuk menyelesaikan persoalan yang mungkin timbul. Sekaligus, peristiwa-peristiwa itu merupakan upaya untuk memposisikan letak peran agama dalam pembangunan Indonesia modern.

Perdebatan seputar hubungan Islam negara diramaikan oleh kubu Islamis dan "sekularis", keduanya sama-sama mempunyai pengikut. Kubu pertama terlihat dalam pemikiran politik Agus Salim dan Mohammad Natsir, sedang kubu kedua bisa dilihat dalam pemikiran Soekarno. Kegagalan Agus Salim dan Mohammad Natsir dalam menempatkan Islam sebagai dasar negara, menyebabkan peta pemikiran politik Islam di Indonesia mengalami orientasi baru. Islam tidak lagi diperlihatkan dalam bentuk dan wajah yang

formalis, melainkan lebih ke arah substantif. Konsep Islam sebagai Agama Negara kemudian meredup untuk menjadi simbol politik Islam di Indonesia.

Sejak Indonesia menjadikan Pancasila sebagai ideologi formal oleh panitia yang dipimpin Soekarno, Pancasila menjadi bagian perdebatan politik yang tak terelakan oleh para agamawan dan politikus, khususnya Islam. Pada tahun 1955-1955 melahirkan sistem multipartai, dan ini menjadi kesempatan besar bagi partai Islam untuk memperjuangkan Islam sebagai asas negara, akan tetapi apa yang dicita-citakannya sampai sekarang masih belum tercapai.

Dalam sejarah politik di Indonesia gerakan-gerakan politik yang berbau agama (Islam) hampir selalu berhadapan dengan Penguasa. Selama dua dasawarsa pertama di bawah kekuasaan Orde Baru, umat Islam sering ditempatkan pada posisi dikambinghitamkan dalam pengumpulan ideologi negara. Umat Islam dengan menggunakan wacana Islam sebagai ideologi, menjadi kelompok yang terus menerus dicurigai dan dianggap sebagai kelompok yang tidak mempercayai ideologi Negara (Pancasila) seratus persen.⁴ Seperti disimpulkan oleh Donald K. Emmerson, sejak satu dasawarsa lalu, bahwa sepanjang kesejarahannya yang berlangsung separuh abad lebih (1940-sekarang), Islam politik sebenarnya telah kalah, baik secara konstitusional, fisik, birokratis, elektoral, dan simbolik.

Selanjutnya dalam dekade 1980-an, terjadi pergeseran orientasi di kalangan organisasi-organisasi kemasyarakatan Islam, kaum intelektual, dan

⁴ Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), hlm 144

para aktivis nonpartai. Generasi baru ini, yang dalam bahasa Bakhtiar Effendy⁵ disebut "intelektual baru Islam", menempuh strategi kultural dengan memproduksi wacana politik Islam yang inklusif dan substansialistik. Tujuannya terutama untuk memperbaiki hubungan yang tidak harmonis antara Islam dengan negara. Yakni, mencari pola relasi agama (Islam) dan negara yang lebih harmonis dan tidak saling curiga.

Gerakan Islam yang substansialis-inklusif ini berhasil membuat hubungan harmonis dengan rezim orde baru yang ditandai dengan sejumlah kebijakan politik pemerintah yang mengakomodasi aspirasi umat Islam. Antara lain kebijakan mengenai Undang-Undang Pendidikan Nasional (1988), Undang-Undang Peradilan Agama (1989), berdirinya ICMI (1990), surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri dalam Negeri dan Menteri Agama tentang Efektivitas Pengumpulan Zakat (1991), dan surat Keputusan Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah P & K tentang diizinkannya pemakaian jilbab bagi pelajar putri.⁶

Namun ketika Orde Baru jatuh dari kekuasaannya, banyak bermunculan gerakan Islam garis keras, militan, radikal, dan bahkan fundamentalis. Kemunculan kelompok ini sebenarnya sudah diawali sejak berubahnya kebijakan Negara pada dasawarsa 1980-an, dan peminggiran

⁵ Bahtiar Effendy, "Fenomena Partai Islam" dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abidin (ed), *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu Sampai Pemilihan Presiden*, (Jakarta: Alfabet, 1999), hlm. 125

⁶ M. Syaffi Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia. Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, (Jakart: Paramadina, 1995), hlm. 12

Islam ke akomodasi Islam.⁷ Semenjak kejatuhan Orde Baru, kelompok Islam ini menemukan momentumnya untuk melakukan akselerasi politik secara kultural (ormas Islam) dan struktural (partai Islam).

John L Esposito berpendapat bahwa terjadinya kebangkitan gerakan Islam di dorong oleh tiga hal: *pertama*, adanya krisis identitas yang menimbulkan ketidakberdayaan, kekecewaan, dan kehilangan rasa harga diri; *Kedua*, kecewa dengan barat dan kegagalan pemerintah untuk bereaksi secara cukup akan kebutuhan-kebutuhan politik dan sosial-ekonomi masyarakat; *ketiga*, tampilnya kembali rasa harga diri dan kesadaran akan kekuatan sendiri akibat sukses militer (Arab-Israel) dan ekonomi (embargo minyak pada tahun 1973).⁸ Inilah sejarah terpenting dari kebangkitan gerakan keagamaan militan seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia, Laskar Jihad, dan Majelis Mujahidin di Indonesia.

Karena itu, trend Islam yang mengemuka di Indonesia kontemporer sejak lengsernya Orde Baru adalah lahimya Islam radikal, yang diwakili sejumlah ormas Islam seperti Laskar Jihad, Forum Pembela Islam (FPI), dan Majelis Mujahidin dan terakhir Partai Keadilan (PK) yang kemudian menjadi Partai Keadilan Sejahtera (yang selanjutnya disingkat menjadi PKS).

PKS merupakan salah satu dari gerakan keagamaan yang mengedepankan substansi dari Islam itu sendiri. PKS tentu saja berbeda dengan gerakan-gerakan Islam lain yang cenderung bercorak-legal formal

⁷ *Tashwirul Afkar*, "Deformalisasi Syariat", Edisi no. 12 th. 2002, Lakpesdam, Jakarta, hlm. 29

⁸ Lihat pengantar John L. Esposito, "Islam dan Politik Muslim", dalam *Dinamika Kebangkitan Muslim, Watak, Proses, dan Tantangan*, (Jakarta: Rajawali Press, 1987), hlm 14.

Islam secara total sehingga isu utama yang diperjuangkan adalah tegaknya syari'at Islam di dalam negara Indonesia. Di sinilah letak pentingnya penelitian terhadap PKS ini. Dalam penelitian ini Penulis berusaha mencari posisi PKS dalam hubungan agama dan negara, benarkah apa yang diwacanakan selama ini bahwa PKS ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam? Jawabannya bisa jadi ya maupun tidak, atau malah mencari aman dengan ikut arus situasi politik nasional atau meminjam istilahnya Goenawan Muhammad hanya menjadi kurva lonceng.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dideskripsikan di atas, maka rumusan masalah yang bisa ditarik oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang pendirian PKS?
2. Bagaimana wacana mengenai hubungan Islam dan negara di dunia Islam secara umum dan Indonesia secara khusus?
3. Bagaimana gagasan PKS tentang hubungan agama dan negara?

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang pendirian PKS serta apa saja visi dan misinya
 - b. Untuk memahami konteks sosial-politik yang melatarbelakangi munculnya Wacana hubungan agama (Islam) dan Negara

- c. Untuk mengetahui bagaimana pemikiran PKS tentang hubungan agama dan negara.
2. Kegunaan penelitian ini adalah:
 - a. Penelitian yang ditulis penulis ini diharapkan bisa menambah pengetahuan pembaca secara umum bagaimana sejarah berdirinya PKS serta apa saja visi dan misinya
 - b. Penelitian ini juga diharapkan mengetahui tentang konteks sosial-politik yang melatarbelakangi lahirnya wacana mengenai hubungan antara agama dan negara,
 - c. Penelitian yang tidak terlalu tebal ini diharapkan juga bisa menjadi karya tulis ilmiah yang dapat digunakan untuk mengkaji tentang diskursus Islam politik secara umum dan wacana hubungan agama dan negara secara khusus, serta bagaimana PKS merumuskan agama dalam wacana tadi.

D. Telaah Pustaka

Untuk membuktikan orisinalitas karya tulis ilmiah ini, maka penulis akan menunjukkan sejumlah karya tulis Ilmiah yang telah membahas tentang gerakan Islam di Indonesia, khususnya tentang PKS.

Buku *Ideologi politik PKS* karangan Imdadun Rahmat. Buku ini merupakan karangan yang mengetengahkan seputar ideologi politik PKS. Buku ini juga berisi mengenai sejarah perjalanan PKS dari sejak embirio sebagai gerakan tarbiyah sampai kemudian berbentuk partai politik, namun

karena banyaknya pembahasan yang dibahas sehingga baru mengulas secara umum tentang PKS, buku ini belum secara mendalam mengetengahkan pemikiran hubungan antara agama dan negara menurut PKS.

Buku *Mereka Bicara PKS: Telaah Obyektif Perjalanan Dakwah Politik PKS*. Buku yang diterbitkan sendiri oleh DPP Partai Keadilan Sejahtera ini berisi komentar berbagai tokoh, baik tokoh politik, sosial maupun agama terhadap PKS yang dikumpulkan dari berbagai media, baik cetak maupun elektronik. Karena sifatnya komentar tentunya tidak membahas secara detail mengenai posisi PKS di dalam hubungan agama dan negara.

Buku *Tujuh Mesin Pendulang Suara: Perkenalan Prediksi, Harapan Pemilu 1999*. Buku yang diterbitkan oleh LKiS ini seperti tertera di sub-judulnya mengetengahkan profil partai politik yang bertarung di Pemilu 1999, ditambah dengan prediksi dan harapan semua orang terhadap partai politik yang bertarung ketika itu. Karena buku ini sifatnya hanya mengenalkan disertai dengan prediksi dan harapan oleh sebab itu buku ini belum mendiskusikan secara tuntas mengenai posisi PKS dalam hubungan agama dan negara.

Buku *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera*. Sebagaimana judulnya buku yang diterbitkan oleh DPP Partai Keadilan Sejahtera ini berisi tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga PKS, karena itu buku ini belum mengupas mengenai posisi PKS dalam hubungan agama dan negara.

Buku karangan Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan*, buku ini banyak mengulas PKS sebagai sebuah embrio gerakan Islam politik di

Indonesia, bagaimana latar belakangnya, sejarah pertemuan PKS dengan Ikhwanul Muslimin, serta pergulatannya mempertahankan diri dari tekanan pemerintah Orde Baru Soeharto. Buku ini juga membahas seputar pendirian PKS sebagai partai politik Islam di Indonesia, pergulatan mencari dukungan sampai strategi menghadapi partai-partai besar di Indonesia semacam PDIP dan Golkar. Karena buku ini hanya berisi sejarah perjalanan PKS dari embrio sampai berdirinya, maka wacana mengenai hubungan agama dan negara perspektif PKS belum begitu komprehensif dibicarakan.

Buku karangan Munawir Sjadzali *Islam dan Tata Negara*. Buku ini berbicara secara umum tentang ajaran, sejarah dan pemikiran hubungan Islam dengan tata negara. Buku ini mengulas secara ringkas seputar teori dan pemikiran tentang hubungan agama dan negara. Pentingnya buku ini dikarenakan teori yang termuat di dalamnya dijadikan pijakan dalam menganalisis posisi PKS dalam hubungan agama dan negara. Namun karena sifatnya teori buku ini pun masih bersifat umum sehingga belum menyentuh persoalan PKS. Kalaupun dipakai nantinya hanya untuk analisis lebih dalam terhadap penelitian ini.

Skripsi saudara Nur Faizin, *Islam dan Peran Politik Perempuan (Studi Kasus Terhadap Partai Keadilan Sejahtera Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Pemilu 2004)*. Skripsi yang tidak diterbitkan ini mengeksplorasi seputar Islam politik dibaca melalui perspektif gender. Penulis skripsi ingin menjelaskan bahwa dalam sebuah partai politik, peran perempuan tidak bisa dianggap remeh, karena sekitar 60 persen pemilih di Indonesia adalah

perempuan. Karena sifatnya studi gender walaupun dari persepektif PKS, skripsi belum membahas mengenai hubungan agama dan negara.

Skripsi dengan judul *Khilafah Islamiyah: Studi Perbandingan Hizbut Tahrir Indonesia Dan Partai Keadilan sejahtera* yang ditulis oleh Heriyanto. Skripsi ini melakukan studi komparasi terhadap HTI dan PKS seputar masalah *Khilafah Islamiyah*. Karena skripsi ini hanya berisi seputar masalah *Khilafah Islamiyah* itupun melakukan perbandingan antara PKS dan HTI, maka skripsi ini belum menyentuh persoalan seputar bagaimana posisi PKS jika dikonteks kan dengan teori agama dan negara.

Skripsi Emi Yuniarti, *Konsep Kesejahteraan dalam Prespektif Partai Berbasis Agama (studi Perbandingan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dan Partai Damai Sejahtera (PDS)*. Sebagaimana sudah terlihat di judulnya, skripsi Emi ini membahas seputar konsep *Kesejahteraan* dalam pandangan partai yang Berbasis Agama dalam hal ini diwakili PKS yang mewakili Islam dan PDS yang mewakili Kristen. Karena hanya membahas seputar konsep kesejahteraan, skripsi ini pun tidak membahas PKS dalam hubungan agama dan negara.

Skripsi Akhmad Rizano, *Konsepsi Moral Politik Partai Keadilan Sejahtera*. Sebagaimana judulnya, penelitian ini mengulas seputar pandangan PKS mengenai moral. Karena pembahasannya seputar moral skripsi ini juga belum menyinggung seputar posisi PKS dalam teori hubungan agama dan negara.

Skripsi Syifa'urrohman Dahlan, *Kriteria kepala negara menurut Partai Keadilan Sejahtera perspektif Fiqh Siyasah*. Skripsi menjelaskan bagaimana kriteria PKS dalam memilih kepala negara, apakah harus orang Islam, apakah harus seorang laki-laki dan lain-lain. Karena bahasannya hanya seputar kriteria bagaimana memilih pemimpin, skripsi ini pun masih belum menyinggung tema skripsi penulis.

Skripsi saudari Mariyam *Visi Politik Islam dalam Bernegara (Perbandingan Hizbut Tahrir Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera)*. Dari judulnya kita bisa mengetahui bahwa skripsi ini merupakan studi komparasi mengenai Visi politik Islam dalam bernegara. Sepintas lalu kelihatan bertentangan mengingat HTI merupakan organisasi yang anti demokrasi sedangkan PKS sebaliknya, yang melakukan perjuangan melalui jalur struktural. Walaupun sedikit menyinggung seputar masalah agama dan negara namun, skripsi ini masih belum secara tegas memposisikan PKS berada di mana.

E. Kerangka Teori

Sebagai penelitian yang memfokuskan pada kajian pemikiran politik tentang hubungan agama dan negara, maka paparan mengenai kerangka teori dari penelitian ini sangat diperlukan. Namun, perlu dicatat bahwa dalam penelitian ini penulis tidak bermaksud memberikan konsep-konsep yang bersifat spesifik, karena rumit dan luasnya konsep-konsep yang berkenaan dengan studi pemikiran politik. Karenanya konsep-konsep yang penulis

paparkan berikut ini tidak lebih hanya sekedar sebagai tambahan pengetahuan bagi pembaca saja.

Menurut pakar tata negara, Miriam Budiarjo, istilah “negara” adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.⁹ Negara, tambah Miriam lagi, merupakan suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang berhasil menuntut para warga negaranya taat kepada peraturan perundang-undangan melalui penguasaan (*control*) monopolitis dari kekuasaan yang sah.¹⁰

Untuk mengatur pola hubungan itu, yakni pejabat dan rakyat, diperlukan sistem politik yang disepakati bersama. Sistem politik, menurut Dahl dapat didefinisikan sebagai setiap pola hubungan manusia yang kokoh dan melibatkan—secara cukup menonjol—kendali, pengaruh, kekuasaan dan kewenangan.¹¹ Sistem politik yang diyakini dapat membawa negara dan rakyatnya kepada keadaan yang lebih baik adalah demokrasi.¹²

Berbeda lagi, bila kita merujuk pendapat St. Agustinus mengenai negara, baginya negara merupakan hasil dari proses hubungan timbal balik

⁹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet.xx (Jakarta: Gramedia, 1999), hlm. 38.

¹⁰ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu*, hlm. 40.

¹¹ Robert A. Dahl, *Analisis Politik Modern*, alih bahasa Mustafa Kamil Ridwan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1994), hlm. 4

¹² Robert A. Dahl, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat*, alih bahasa A.Rahman Zaenudin, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 53.

suatu dialektika antara manusia dengan kebutuhan realitas secara sosial politik di lingkungannya. Ia menganalogikan negara sebagai suatu makhluk hidup, ia berkembang, tumbuh, dan bergerak dinamis, dengan keniscayaan dalam mengalami kehancuran. Bagi Augustinus, negara berkewajiban menjadi agen penjunjung perdamaian, tujuan negara adalah agar manusia dapat secara holistik mengabdikan diri dengan pasrah pada keagungan Tuhan. Negara Tuhan baginya ditengarai dengan adanya keimanan rakyatnya yang kuat, yang selalu diperbarui tiap waktu dengan ritual-ritual penyucian jiwa, dan perlawanan terhadap hawa nafsu, tidak hanya mencari kebahagiaan dunia semata. Karena dengan beginilah tujuan dunia dan akhirat terpenuhi, dengan demikian juga secara pasti kebahagiaan dan perdamaian akan tercapai.¹³

Kata “agama” berasal dari bahasa Sangsekerta yang berarti tradisi, tidak bergerak, peraturan menurut konsep Veda. Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa ”agama” adalah sistem atau prinsip kepercayaan kepada Tuhan, atau juga disebut dengan nama Dewa atau nama lainnya dengan ajaran kebhaktian dan kewajiban-kewajiban yang bertalian dengan kepercayaan tersebut”.¹⁴

Agama dalam bahasa Arab ialah *dīn*, yang artinya: taat, takut dan setia, paksaan, tekanan, penghambaan, perendahan diri, pemerintahan, kekuasaan, siasat, balasan, adat, pengalaman hidup, perhitungan amal. Sinonim kata din

¹³ Nasiwan, *Teori Teori Politik*, (Yogyakarta, FISE UNY Pres, 2007), hlm.123.

¹⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997. hlm. 10

dalam bahasa Arab ialah *milah*. Bedanya, *milah* lebih memberikan titik berat pada ketetapan, aturan, hukum, tata tertib, atau doktrin dari *ḍīn* itu.¹⁵

Sedangkan Endang Saifuddin Anshari mendefinisikan bahwa agama pada umumnya merupakan suatu sistem kredo 'tata keimanan' atau 'tata keyakinan' atas adanya suatu yang mutlak di luar manusia. Selain itu ia juga merupakan sistem ritus 'tata peribadahan' manusia kepada sesuatu yang dianggap Yang Mutlak, juga sebagai sistem norma 'tata kaidah' yang mengatur hubungan antar manusia serta manusia dengan alam lainnya sesuai dan sejalan dengan tata keimanan dan tata peribadatan itu.¹⁶

Agama juga merupakan sekumpulan ajaran yang bersifat transenden. Semua ajaran diyakini sebagai kebenaran yang tak terbantahkan, sebab ia merupakan agama yang diturunkan oleh Tuhan melalui Rasul-Nya. Islam sebagai salah satu agama samawi memahami bahwa Tuhan memiliki aturan agung untuk alam semesta ini. Alam semesta raya ini hanya berjalan sesuai aturan yang telah dirancang dengan cermat dan cerdas. Islam meyakini bahwa semesta raya ini merupakan kerajaan Tuhan Allah. Dialah yang menciptakannya. Tuhan yang mengendalikan setiap serasmi kehidupan kita, dan tidak seorangpun yang dapat lolos dari sisir-Nya.¹⁷

¹⁵ <http://id.wikipedia.org/wiki/Agama>. Diakses pada tanggal 31 Maret 2010.

¹⁶ Lukman bin Ma'sa, dalam <http://www.scribd.com/doc/15779945/Agama-Dan-Negara-Pandangan-M-Natsir>, yang dikutip dari Endang Saifuddin Anshari, *Wawasan Islam Pokok-Pokok Pikiran Tentang Paradigma dan Sistem Islam*, (Jakarta GIP, 2004), hlm. 30, diakses 31 Maret 2010.

¹⁷ Abu A'la al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, alih bahasa, Asep Hikam, cet VI (Bandung: Mizan, 1998), hlm 66. Abu A'la al-Maududi menegaskan bahwa syari'ah adalah skema kehidupan yang sempurna dan meliputi seluruh tatanan kemasyarakatan. Maududi juga menawarkan sistem pemerintahan dengan istilah "teo-demokrasi" yaitu suatu sistem pemerintahan demokrasi ilahi, suatu sistem kedaulatan rakyat yang dibatasi kedaulatan Tuhan lewat hukum-hukumnya.

Sementara itu Syaikh Muhammad Abdullah Badran mendefinisikan agama secara kebahasaan. *Dīn* yang biasanya diterjemahkan “agama”, menurut Guru Besar Al-Azhar itu, menggambarkan hubungan antara dua pihak di mana yang pertama mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada yang kedua. Jadi agama adalah hubungan makhluk dan Khaliq-Nya yang mewujud dalam sikap batinnya serta tampak dalam ibadah yang dilakukannya dan tercermin pula dalam sikap kesehariannya.¹⁸

Secara sosiologis Emile Durkheim mendefinisikan agama sebagai sebuah sistem kepercayaan dan ritual yang berkaitan dengan yang suci (*the secret*) dan ia berfungsi mengikat masyarakat bersama-sama dalam kelompok kelompok.¹⁹ Jadi, secara teologis, Islam dapat diartikan sebagai sistem nilai dan ajaran yang bersifat Ilahiah dan karena itu sekaligus bersifat transenden. Tetapi dari sudut sosiologis, ia merupakan fenomena peradaban, kultural dan realitas sosial dalam kehidupan manusia.²⁰

Oleh Karena itu, kemunculan ungkapan *al-Islām dīn wa daulah* (Islam adalah agama dan negara) yang mengisyaratkan kekuatan agama dan negara adalah hal yang wajar, meski bersifat problematis. Dalam upaya menjawab

¹⁸ M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 209-210.

¹⁹ Dikutip oleh Dawam Raharjo, “Agama, Islam dan Negara” dalam Mukti Ali dkk., *Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*, Imron Rasyidi (ed.), (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1998), hlm. 13.

²⁰ Azyumardi Azra, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. i.

masalah ini beberapa pengamat politik Islam cenderung untuk melihatnya secara “monolitik”, karena tunduk kepada sebuah paradigma bahwa hubungan antara Islam dan politik pada hakikatnya bersifat “organik”. Akhirnya, mereka memandang Islam sebagai sesuatu yang sejak awalnya merupakan agama politik.²¹ Kelemahan paradigma ini adalah tidak mempertimbangkan kenyataan bahwa Islam adalah sebuah agama yang multi-interpretatif, yang membuka kemungkinan banyak penafsiran mengenainya (*a polyinterpretable religion*). Oleh karena itu, politik Islam tidak bisa dilepaskan dari sejarah Islam yang multi interpretatif semacam ini.

Banyak tokoh yang memiliki sudut pandang berbeda tentang konsep-konsep agama dan negara. Dalam diskursus politik Islam sedikitnya ada tiga teori tentang hubungan agama dan negara, di antaranya adalah:

1. Integralisme

Integralisme adalah teori yang berpandangan konsep bersatunya agama dan negara. Dengan kata lain Agama dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Wilayah agama juga meliputi politik atau negara. Karenanya, menurut paradigma ini negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi (*divine sovereignty*), karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di "tangan" Tuhan.²²

²¹ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Umat Islam di Indonesia*, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm. 4.

²² Azyumardi Azra *Pergolakan Politik Islam, Dari Fundamentalisme. Modernisme Hingga Postmodernisme*, (Jakarta: Paramadina, 1996), hlm. i.

2. Sekularisme

Teori sekularisme merupakan antitesis dari teori kelompok pertama, yaitu, bersifat sekularistik. Kelompok ini memandang bahwa Islam tidak lebih dari agama-agama lain, seperti hanya di Barat. Islam tidak terkait dengan urusan politik kenegaraan. Lebih lanjut, pendapat ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekuleristik menolak pendasaran negara pada Islam atau, paling tidak, menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara.²³

3. Simbiosis Mutualisme

Teori ini memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik yaitu hubungan timbal-balik dan saling memerlukan. Negara ditempatkan sebagai sarana penunjang perkembangan agama. Dan agama diposisikan sebagai pembimbing etika dan moral suatu negara. Pandangan simbiosis agama dan negara dapat diketemukan dalam pemikiran beberapa tokoh Islam, misalnya al-Marwadi.²⁴

Mengikuti tiga teori relasi agama dan negara di atas, maka teori pertama, mengandaikan ideologi negara adalah agama (Islam), pendapat kedua ideologi negara tidak ada kaitannya apapun dengan agama keduanya merupakan dua entitas yang terpisah pendapat yang ketiga, antara ideologi

²³ M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Orde Baru*, (Jakarta: Logos, 2001), hlm, 49.

²⁴ Bernama lengkap Abu Hasan Ali Habib al-Mawardi al-Bishri (354-450 H). Dia adalah seorang ulama' pemikir terkenal. Karya-karyanya di bidang politik antara lain, Peraturan-Peraturan Pemerintahan Dan Ketetapan-Ketentuan Kewaziran, Politik Raja.

negara dan agama saling mempengaruhi. Artinya ideologi negara tidak membatasi kebebasan dalam beragama malah sebaliknya memberikan kesempatan yang luas bagi pertumbuhan agama.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Karena itu, langkah awal yang penulis tempuh ialah mengumpulkan data-data yang dibutuhkan, berupa Skripsi, buku, majalah, jurnal, serta koran yang memuat pikiran PKS tentang konsep Negara setelah itu kemudian diklasifikasikan dilanjutkan dengan menganalisisnya. Data-data tersebut disebut literatur.

1. Obyek penelitian

Obyek material yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah filsafat politik, sedangkan obyek formal dalam penelitian ini adalah pemikiran partai Keadilan Sejahtera tentang Hubungan agama dan Negara.

2. Sumber data

Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya mengenai Partai Keadilan Sejahtera, baik yang ditulis oleh anggota partai ataupun orang yang di luar partai, yaitu, Yon Machmudi, *Partai Keadilan Sejahtera Wajah Baru Islam Politik Indonesia*, M., Imdadun Rahmat, 2008 *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung parlemen*, Ali Said Damanik, *Fenomena Partai Keadilan, Mereka Bicara PKS: Telaah Objektif*

Perjalanan Dakwah Politik PKS. Tujuh Mesin Pendulang Suara: Perkenalan Prediksi, Harapan Pemilu 1999, Sapto Waluyo, *Kebangkitan Politik Dakwah; Konsep dan Pratik Politi PKS*, Djony Edward, *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera*, serta karya-karya lainnya sejauh mendukung pokok bahasan. Adapun sumber data sekunder terdiri dari buku-buku, kamus, tulisan atau karya tulis, opini yang terdapat dalam jurnal, majalah, koran atau karya tulis lainnya yang terkait dengan tema tulisan ini. Dengan demikian sumber-sumber sekunder tersebut dapat melengkapi analisis skripsi ini.

Setelah data terkumpul, penulis mengolah data-data tersebut dan mengklasifikasikannya sesuai pokok kajian. Untuk menganalisis data-data yang terkumpul penulis menggunakan beberapa metode di antaranya adalah:

- a. Deskriptif. Metode ini digunakan untuk mendeskripsikan tentang latar belakang munculnya PKS serta bagaimana PKS memandang tentang hubungan antara agama dan negara.
- b. Kesenambungan historis. Metode ini penulis gunakan untuk melacak sejarah dan latar belakang PKS serta bagaimana pemikiran PKS tentang hubungan antara agama dan negara.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam tulisan ini pembahasan akan diklasifikasi dan sistematisasi menjadi lima bab sebagai berikut. Pada bab pertama akan dibahas pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan

penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Pada bab kedua akan dibahas seputar latar belakang dan sejarah berdirinya PKS, yang kemudian dilanjutkan dengan visi dan misi PKS, serta pola perjuangannya.

Pada bab ketiga penulis akan membahas tentang wacana hubungan agama dan negara di dunia Islam secara umum dan Indonesia secara khusus serta bagaimana polemik pemikiran tentang keduanya.

Pada bab empat penulis akan menganalisis pembacaan PKS mengenai hubungan antara agama dan negara yang kemudian dikontekskan dengan negara Indonesia yang menganut ideologi Pancasila. Pada bab empat ini penulis juga akan mengulas sekaligus akan melihat dimana posisi PKS mengenai hubungan agama dan negara? Apakah integralisme, sekularistik, atau simbiosis mutualisme.

Kemudian pada bab kelima akan diakhiri dengan penutup yang berisi kesimpulan, dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Partai Keadilan Sejahtera banyak dimotori oleh kaum intelektual muda yang mencerminkan substansi kehidupan yang paling banyak dibutuhkan masyarakat saat ini, yaitu keadilan dan Sejarah. Kelahiran partai ini dapat diketahui dengan melihat secara cermat gerakan dakwah Islam yang dibangun secara sistematis oleh aktivis-aktivis muda Islam. Gerakan dakwah ini menjadikan masjid kampus sebagai basis gerakan dakwah mereka dan mulai marak pada awal tahun delapan puluhan. Gerakan dakwah tersebut tergabung dalam Lembaga Dakwah Kampus (LDK) atau Majelis Dakwah Kampus (MDK). Organisasi ini dirintis dan dibina oleh Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII).

LDK terus berkembang dan berhasil melebarkan sayapnya dari tahun ke tahun. Basis operasi mereka juga semakin meluas, tidak hanya dalam lingkungan kampus saja, tetapi sudah mulai memasuki lingkungan masyarakat. Kemudian gerakan ini menjadi gerakan massa di tingkat mahasiswa dan berhasil menguasai lembaga-lembaga formal kemahasiswaan di lingkungan kampus hingga berhasil mendirikan organisasi KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia). Di bawah bendera KAMMI, gerakan ini menguasai satu persatu organisasi eksekutif mahasiswa. Dimulai dari Universitas Indonesia (UI), Institut

Pertanian Bogor (IPB), Institut Teknologi Bandung, (ITB) dan Universitas Gajah Mada (UGM), kemudian meluas sampai ke kampus-kampus lainnya di Jawa dan dan luar Jawa.

Kelahiran Partai Keadilan sendiri merupakan suatu peristiwa yang sangat fenomenal, dikatakan fenomenal karena: *Pertama*, pilihan mendirikan partai politik merupakan bentuk kemunculan publik yang utuh dari sebuah gerakan dakwah yang sebelumnya bergerak dengan menggunakan banyak nama. Secara demokratis hal ini memunculkan semua potensi dan sumber daya yang ada secara lengkap. *Kedua*, pilihan untuk mendirikan partai politik merupakan sebuah keputusan yang sebelumnya tidak pernah diduga bahkan oleh para kadernya sendiri dan sempat memunculkan kontroversi. Meski demikian kontroversi ini tidak berlanjut menjadi konflik terbuka. Dengan adanya mekanisme pengelolaan konflik yang tepat sehingga dapat terealisasikan dengan baik dan tidak menjadi konsumsi publik. *Ketiga*, pilihan pendirian partai politik ini kemudian membawa konsekuensi pada masuknya gerakan dakwah dalam proses politik praktis dengan logika dan sistemnya sendiri, yang di masa lalu merupakan sesuatu yang sempat mereka (aktifis gerakan tarbiyah) jauhi. Pilihan ini tidak terduga sebelumnya mengingat tidak pernah ada indikasi kecenderungan kelompok ini terhadap dunia politik praktis, karena aktivitas yang digeluti sehari-sehari dan menjadi ciri khas kelompok ini adalah aktivitas dakwah, karena itu mewartakan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Bidang politik—apalagi dalam pengertian

yang sangat praktis seperti berpartai, hampir tidak pernah disentuh dalam gerakan mereka sebelumnya.

Momentum reformasi yang terjadi merupakan faktor penarik sekaligus pendorong yang sangat kuat bagi lahirnya keputusan mendirikan partai. Beberapa fakta yang mengemuka berkaitan dengan hal ini: *Pertama*, dalam perjalanan sejarah, pergerakan dakwah ini tidak pernah ada indikasi keterlibatannya dalam politik praktis. *Kedua*, partai ini lahir dalam bentuk partai yang sama sekali berbeda. Berbeda di sini artinya partai ini tidak memiliki keterkaitan dengan partai politik di masa lalu.

Partai Keadilan (Sejahtera) didirikan dengan sebuah keputusan yang diambil berdasarkan survei yang dilakukan kepada para aktivis gerakan dakwah kampus diseluruh Indonesia, bahkan diluar negeri. Survei ini berbentuk jajak pendapat (*polling*) yang bertujuan menjajaki aspirasi para aktivis dakwah yang dimaksud. Dalam menghadapi situasi reformasi yang kala itu terjadi di Indonesia.

Inti pertanyaan yang diajukan dalam jajak pendapat tersebut adalah bentuk apa yang akan ditampilkan untuk muncul ketengah publik pada era reformasi ini? Apakah berbentuk organisasi massa (Ormas), organisasi politik (Orpol), atau tetap mempertahankan bentuk penampilan yang selama ini digunakan, yaitu dalam berbagai bentuk lembaga dan yayasan.

Kuesioner ditujukan kepada kurang lebih 6000 orang aktivis dakwah yang tersebar diseluruh Indonesia, bahkan beberapa di antaranya di luar negeri, dan kuesioner dikualifikasikan kepada mereka yang selama

ini terlibat aktif dalam gerakan dakwah. Teknik yang digunakan untuk menjangkau sample yang berjumlah 6000 orang itu adalah dengan metode yang terukur.

Para tokoh gerakan dakwah ini sering bertemu dalam berbagai acara yang diselenggarakan, baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Dari perjumpaan-perjumpaan dalam berbagai acara tersebut (seminar, diskusi, bedah buku dan sebagainya terbentuklah semacam kesalingpahaman terhadap cara berpikir, visi dan orientasi masing-masing, khususnya yang terkait dengan cara pandang terhadap aktivitas dakwah dan gerakan keagamaan (Islam). Kemudian berlanjut dengan pembangunan terkelola sedemikian rupa, sehingga mempermudah dalam proses sosialisasi maupun konsolidasi berbagai isu dan gerakan dakwah. Termasuk pengadaan *polling* yang dilakukan tokoh di Jakarta yang melibatkan tokoh-tokoh gerakan dakwah.

Efektivitas pengelolaan jaringan tersebut, ternyata cukup baik. Terbukti dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, dari 6000 buah kuesioner yang disebar, kembali kurang lebih 5800 buah (97%), dan hasilnya ternyata cukup menggembirakan, yaitu 68% diantaranya menginginkan pendirian partai dan hanya 27% menginginkan untuk mendirikan organisasi massa. Sementara sisanya ingin mempertahankan dan kembali ke bentuk semula, yaitu dalam bentuk yayasan, LSM, Organisasi Kampus, Pesantren dan berbagai lembaga-lembaga lainnya.

Di lapangan masjid al-Azhar Kebayoran Baru, tokoh-tokoh representatif dari berbagai golongan hadir untuk membahas hasil jajak pendapat tersebut. Hasil dari pertemuan tersebut ialah dengan dideklarasikannya Partai Keadilan sebagai partai politik. Peristiwa ini tepatnya pada tanggal 9 Agustus 1998 tokoh-tokoh tersebut dikenal dengan *daurah* pendiri Partai Keadilan yang kesemuanya berjumlah 52 orang. Piagam deklarasi itu sendiri dibacakan oleh Dr. Hidayat Nur Wahid, yang saat itu menjadi ketua dewan pendiri partai keadilan, dan dibacakan dihadapan sekitar 50.000 orang simpatisan dan pendukungnya.

2. Banyak tokoh yang memiliki sudut pandang berbeda tentang konsep-konsep agama dan negara. Namun dari banyaknya konsep itu dapat dibagi menjadi tiga kelompok. Kelompok pertama adalah kelompok yang berpendapat bahwa agama dan negara itu sifatnya integral. Dengan kata lain agama dan negara tidak dapat dipisahkan (*integrated*). Wilayah agama juga meliputi politik atau negara. Karenanya, menurut paradigma ini negara merupakan lembaga politik dan keagamaan sekaligus. Pemerintahan negara diselenggarakan atas dasar kedaulatan Ilahi (*Divine Sovereignty*), karena memang kedaulatan itu berasal dan berada di "tangan" Tuhan.

Kelompok kedua merupakan antitesis dari kelompok pertama, bersifat sekularistik. Kelompok ini memandang bahwa Islam tidak lebih

dari agama-agama lain, seperti halnya di Barat. Islam tidak terkait dengan urusan politik kenegaraan. Lebih lanjut, pendapat ini menolak baik hubungan integralistik maupun hubungan simbiotik antara agama dan negara. Dalam konteks Islam, paradigma sekuleristik menolak pendasaran negara pada Islam atau, paling tidak, menolak determinasi Islam akan bentuk tertentu dari negara.

Sedangkan kelompok ketiga memandang agama dan negara berhubungan secara simbiotik yaitu hubungan timbal-balik dan saling memerlukan. Negara ditempatkan sebagai sarana penunjang perkembangan agama. Dan agama diposisikan sebagai pembimbing etika dan moral suatu negara. Pandangan simbiosis agama dan negara dapat diketemukan dalam pemikiran beberapa tokoh Islam, misalnya Al-Marwadi.

3. Berdasarkan pendapat dari beberapa tokoh PKS di atas, bisa diambil benang merah bahwa PKS dalam soal hubungan antara agama dan negara lebih moderat dibandingkan dengan gerakan-gerakan Islam yang lain. Jika dibaca melalui teori hubungan antara agama di mana ada tiga teori, yang pertama, teori intergralistik, teori simbiosis mutualisme, dan yang ketiga sekularistik. PKS tampaknya lebih dekat dengan teori yang pertama. Yakni teori integralisme, hal ini sesuai dengan pandangan PKS dalam memandang Islam. Menurut PKS, Islam itu sudah mengatur manusia dalam berbagai bidang, termasuk bidang politik. Mereka meyakini konsep Islam yang

meliputi *dīn wa daulah*. Hal ini juga terlihat dari pernyataan tokoh-tokoh PKS dan platformnya yang lebih memilih piagam madinah sebagai acuan dalam mengambil keputusan mengenai Islam di Indonesia yang dikenal dengan masyarakat plural dan multikultur. Sedangkan kalau mengikuti tipologi yang dibuat oleh Syafi'i Anwar, PKS ditempatkan pada tipologi yang kedua, yaitu legal-eksklusif, hal ini berdasarkan pada beberapa agenda Islamis PKS. Di antaranya adalah, penerapan syariat Islam, membentuk partai politik Islam serta membentuk pemerintahan yang berlandaskan agama.

B. Saran

PKS merupakan partai yang secara manajemen tertata dengan baik. Namun karena beragamnya pendapat beberapa tokohnya sehingga menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat umum. Semisal mengenai penerapan syariat Islam, apakah PKS ingin menerapkan Islam atau tidak belum ada jawaban yang pasti mengenai hal ini. Oleh karena itu diharapkan kemudian agar PKS lebih tegas dalam bersikap ataupun mengambil kebijakan. Karena selama ini PKS hanya memanfaatkan situasi dan kondisi bangsa Indonesia yang lagi dirundung banyak masalah, baik itu berupa ekonomi, supremasi negara, dan yang paling penting adalah moral bangsa Indonesia yang kian hari tambah merosot. Melihat gelagatnya PKS merupakan masa depan politik Islam, karena dari tahun ke tahun jumlah peroleh suaranya terus meningkat. Dari 1,5 persen, meningkat menjadi 7 persen pada tahun 2004 serta 8 persen tahun 2009 hal ini menunjukkan bahwa PKS dari segi dukungan mengalami penambahan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al-Maududi, Abu A'la, 1998, *Hukum dan Konstitusi: Sistem Politik Islam*, alih bahasa, Asep Hikam, cet VI, Bandung: Mizan,
- Amiruddin, M. Hasbi, 2000, *Konsep Negara Islam Menurut Fazlur Rahman*, Yogyakarta: UII-Press.
- Anshari, Endang Saifuddin 1997, *Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Sebuah konsensus nasional tentang Dasar Negara Republik Indonesia (1945-1949)* (Jakarta Gema Insani Press.).
- Anwar M. Syaffi , 1995, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia. Sebuah Kajian Politik Tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*, Jakarta. Paramadina.
- , 2006, "kata pengantar" *Islamku, Islam Anda, Islam Kita; Agama Masyarakat Negara Demokrasi*, Jakarta: The Wahid Institute.
- Azra, Azyumardi, 1996, *Pergolakan Politik Islam, dari Fundamentalisme, Modernisme hingga Post-Modernisme*, Jakarta: Paramadina,
- Budiarjo, Miriam, 1999. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. XX, Jakarta: Gramedia, 1999.
- Dahl, Robert A, 2001, *Perihal Demokrasi: Menjelajahi Teori dan Praktek Demokrasi secara Singkat*, alih bahasa A.Rahman Zaenudin, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- , 1994. *Analisis Politik Modern*, alih bahasa Mustafa Kamil Ridwan, Jakarta: Bumi Aksara,
- Damanik, Ali Said, 2002, *Fenomena Partai Keadilan: Tranformasi 20 Tahun Gerakan Tarbiyah di Indonesia*, Jakarta: Teraju.
- DPP Pengurus Pusat Partai Keadilan, *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga* (Jakarta: DPP Pengurus Pusat Partai Keadilan.

- DPP-PK-Sejahtera, 2007, *Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera*, Jakarta: DPP PK-Sejahtera,
- Edward, Djony, 2006, *Efek Bola Salju Partai Keadilan Sejahtera*, Bandung: Harakatuna.
- Effendy, Bahtiar, 2001, *Teologi baru Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, Yogyakarta: Galang Press.
- , 1998, *Islam dan Negara, Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Umat Islam di Indonesia*, Jakarta: Paramadina.
- , 1999, "Fenomena Partai Islam" dalam Hamid Basyaib dan Hamid Abidin (ed), *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu Sampai Pemilihan Presiden*, Jakarta: Alvabet.
- , 2001, *Teologi baru Islam: Pertautan Agama, Negara dan Demokrasi*, (Yogyakarta: Galang Press, , hlm 144
- Eko Prasetyo, 2003, *Membela Agama Tuhan: Potret Gerakan Islam dalam Pusaran Konflik Global*, Yogyakarta: Insist Press
- Esposito, John L. E., 1987, "Islam dan Politik Muslim ", dalam *Dinamika Kebangkitan Muslim, Watak, Proses, dan Tantangan*, Jakarta: Rajawali Press,
- Faisal Ismail, 2002, *Pijar-Pijar Islam; Pergumulan Kultur dan Struktur*, (Yogyakarta: LESFI.
- Hamid Basyaib dan Hamid Abidin (ed), *Mengapa Partai Islam Kalah? Perjalanan Politik Islam dari Pra-Pemilu Sampai Pemilihan Presiden*, (Jakarta: Alvabet, 1999), hlm. 125
- Hefner, Robert W. *Civil Islam: Islam dan Demokratisasi di Indonesia*, (Jakarta: ISAI, 2000), hlm. 86.
- Mr mohammad Roem, *Piagam jakarta 22 Juni !945* Endang Saifuddin Anshari,
- Karim M, Rusli, 1999. *Negara dan peminggiran Islam Politik: Suatu Kajian Mengenai Implikasi Kebijakan Islam Orde Baru di Indonesia era 1970-1980-an*. Yogyakarta: Tiara Wacana,
- Lubis, Satria Hadi *Yang Nyata Dari PK-Sejahtera: 35 Manfaat Dan Alasan Mengapa Kita Perlu Mendukung PK-Sejahtera* (Jakarta: Misykat Publication, 2003), hlm, 23-24.

- Ma'arif, Ahmad Syafi'i, 1996, *Islam dan Politik: Teori Belah Bambu Masa Demokrasi Terpimpin 1959-1965*, cet. ke-1 (Jakarta: Gema Insani Press,
- Machmudi, Yon 2005, *Partai Keadilan Sejahtera Wajah Baru Islam Politik Indonesia* Bandung: Harakatuna Publishing.
- Madjid, Nurcholis, 2002, *Problematika Politik Islam di Indonesia*, Jakarta: Grasindo,
- , 2000, *Islam Doktrin dan Peradaban, Sebuah Telaah Kritis tentang Masalah Keimanan, Kemanusiaan, dan Kemodernan*, Jakarta: Yayasan Wakaf Paramadina.
- Nasiwan, 2007, *Teori Teori Politik*, Yogyakarta, FISE UNY Pres.
- Nasution, Harun, 1986, *Islam Ditinjau Dari Berbagai Aspeknya*, Jilid. II. Jakarta: UI-Press.
- , 1982, *Pembaharuan dalam Islam: Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta: Bulan Bintang.
- Noer, Deliar, 1982, *Gerakan Modern Islam di Indonesia, 1900-1942*, Jakarta: LP3ES,
- , 2000, *Partai Islam di Pentas Nasional: Kisah dan Analisis Perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, Bandung: Mizan.
- Raharjo, Dawam, 1998 "Agama, Islam dan Negara" dalam Mukti Ali dkk., *Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*, Imron Rasyidi (ed.), Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Rahmat, M. Imdadun, 2008 *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung parlemen*. Yogyakarta: LKiS.
- Rahzen, Taufik.(ed), 2008, *Almanak Abad Partai Indonesia*. Jakarta: Iboekoe.
- Raziq, Ali Abdur, 2002, *Islam Dasar-dasar Pemerintahan*, terjm. M. Zaid Su'di, (Yogyakarta: Jendela.
- Sahar L Hasan (ed.), 1998, *Memilih Partai Islam: Visi, Misi, dan Persepsi. PKB. PBB. PKU. Keadilan. PPP. Dll*, Jakarta: Gema Insani Press.

- Sanit, Arbi 1999, *Pergolakan Melawan Kekuasaan*. Yogyakarta: INSIST Press,
- Shihab, M. Quraish, 2002, *Membumikan Al-Qur'an, Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan.
- Sjadzali, Munawir, 1993, *Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran*. Jakarta: UIP.
- Suhelmi, Ahmad 2002, *Polemik Negara Islam, Sukarno vs. Natsir*, Jakarta: Teraju. 2002.
- Syamsuddin, M. Din *Islam dan Politik Orde Baru*, Jakarta: Logos, 2001
- . 1999 "Usaha Pencarian konsep Negara" dalam *Sejarah Pemikiran Politik Islam,*" (ed.), Abu Zahra dalam *Politik Demi Tuhan*, Bandung: Pustaka Hidayah,.
- Taba, Abdul Azis, 1996, *Islam dan Negara dalam Politik Orde Baru*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Thoha, Idris, 2004, *Pergulatan Politik Indonesia*, Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Thoha, Miftah, 2003, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Tohari, Hajriyanto Y, 199, 9"Daur Ulang Politik Islam" dalam Abu Zahra (ed.) *Politik Demi Tuhan: Nasionalisme Religius di Indonesia* (Bandung: Pustaka Hidayah.), hlm, 130.
- Waluyo, Sapto, 2005, *Kebangkitan Politik Dakwah; Konsep dan Pratik Politi PKS*, Bandung: Harkatuna Publishing.

Internet

- [www.tokohindonesia .com](http://www.tokohindonesia.com) diakses pada Tanggal 19 Juli 2009
- <http://id.wikipedia.org/wiki/Agama>. Diakses diakses pada 31 Maret 2010.
- www.pk-sejahtera.org diakses pada Tanggal 19 Juli 2009
- Lukman bin Ma'sa, dalam <http://www.scribd.com/doc/15779945/Agama-Dan-Negara-Pandangan-M-Natsir>

Jurnal

Tashwirul Afkar, "Deformalisasi Syariat" , Edisi no. 12 th. 2002, Lakpesdam, Jakarta,
Jurnal Penelitian Agama, vol XIV, No.2 Mei-Agustus 2005.

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1997, Jakarta: Balai Pustaka.

Skripsi

Dahlan, Syifa'urrohman 2004, *Kriteria kepala negara menurut Partai Keadilan Sejahtera perspektif Fiqh Siyasah*. Yogyakarta: Fak. Syariah UIN SUKA.

Heriyanto, 2005, *Khilafah Islamiyah: Studi Perbandingan Hizbut Tahrir Indonesia Dan Partai Keadilan sejahtera*, Yogyakarta: Fak. Ushuluddin UIN SUKA.

Nur Faizin, 2007, *Islam dan Peran Politik Perempuan: Studi Kasus Terhadap Partai Keadilan Sejahtera Daerah Istimewa Yogyakarta Pasca Pemilu 2004*. Yogyakarta: Fak. Syariah UIN SUKA

Mariyam, 2004, *Visi Politik Islam dalam Bernegara (Perbandingan Hizbut Tahrir Indonesia dan Partai Keadilan Sejahtera)*, Yogyakarta: Fak. Syariah UIN SUKA.

Rizano, Akhmad 2004, *Konsepsi Moral Politik Partai Keadilan Sejahtera*. Yogyakarta: Fak. Ushuluddin UIN SUKA.

Yuniarti, Emi 2006, *Konsep Kesejahteraan dalam Prespektif Partai Berbasis Agama (studi Perbandingan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Dan Partai Damai Sejahtera (PDS)*, Yogyakarta: Fak. Ushuluddin UIN SUKA.

CURICULUM VITAE



1. Nama lengkap : Akhmad Kusairi
2. NIM : 06510026
3. Tetala : Pancawarna (palembang), 24 Maret 1986
4. Alamat Yogya : Jl Timoho Utara 64 C Ngentak Sopen, Yogyakarta
5. Riwayat Pendidikan :
 - SDN Pancawarna Pedamaran Timur Palembang (1999)
 - SLTP I Silo Jember Jawa Timur, 2003
 - SMA Al-Falah Silo Jember Jawa Timur, 2006
 - Aqidah dan Filsafat Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2006-sekarang.
6. Nama orang tua
 - Ayah : Taukhid
 - Ibu : Robi'ah
7. Kontak
 - HP : 081904017245
 - Email : akhmadkusairi2@gmail.com

Pengalaman

- Redaktur majalah *Humaniush* Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Anggota Jaringan Islam Kampus Yogyakarta.

- Nominator LKTI Pekan Ilmiah Seni dan Riset (PIONER SE-PTAI Indonesia) 22-25 Agustus di STAIN Pontianak.

Karya Tulis

- "Kembali kepada Tuhan", *Media Indonesia, Sabtu 12 Mei 2007*
- "Jalan Berwarna Menuju Tuhan" *Buletin Kebebasan (LSAF) no 5 10 Agustus 2007*
- "Mengenal Lebih Dekat Sosok Idham Chalid" *Media Indonesia, 28 Juli 2007*
- "Konflik Intra Umat Beragama", Nominator LKTI PIONER Pontianak
- "Menemukan Kembali Indonesia", *Seputar Indonesia, 2007*
- Menggagas Sufi Pinggiran dalam Kehidupan Praktis, *Media Indonesia* 1 Desember 2007.
- *Bersyariah di Masyarakat Multikultur*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
- Dan masih banyak tulisan yang lain.